



## Walikota: Nongkrong Jangan Bawa Sajam

**YOGYA (MERAPI)** - Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengimbau mahasiswa atau warga yang nongkrong agar tidak membawa senjata tajam (sajam). "Kalau mau nongkrong ya nongkrong, tidak perlu bawa sajam. Ini untuk kenyamanan bersama," tegasnya, Senin (1/4).

Hingga kemarin situasi asrama mahasiswa daerah di Kota Yogyakarta mulai kondusif pascakejadian di Lapas Cebongan Sleman. Pantauan ini dilakukan oleh petugas gabungan dari aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP setempat.

"Pendekatan dilakukan secara persuasif. Dari pantauan kemarin kondisinya kondusif" *\*Nyambung halaman 7*

**Walikota:** .....

dan landai," kata Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana. Penghuni asrama daerah diminta untuk mematuhi aturan yang berlaku. Mahasiswa juga diharapkan bisa membaaur dengan masyarakat di lingkungannya dan sama-sama memiliki Yogyakarta dengan menjaga keamanan dan rasa nyaman.

Selain asrama daerah, razia senjata tajam juga diintensifkan. Namun kewenangan razia tersebut menjadi kewenangan pihak kepolisian, sehingga pihaknya

hanya menunggu perintah untuk kelanjutan razia berikutnya.

"Kami siap membantu pihak kepolisian jika diperlukan dalam razia," tambahnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengatakan, kepala daerah di kabupaten atau kota harus tegas dalam menertibkan premanisme. Peraturan yang mengatur permasalahan premanisme juga harus ditinjau kembali, untuk menyikapi masalah yang berkembang di masyarakat.

"Masyarakat juga harus menyikapi keberadaan preman, karena mempunyai kekuatan untuk melawan premanisme," jelas permaisuri Sri Sultan HB X itu di kantor perwakilan DPD DIY Jalan Kusumanegara Yogya.

Menurutnya, kekuatan yang dimiliki masyarakat adalah dengan tidak ambil bagian dalam hal-hal yang berkaitan dengan premanisme. Sekalipun premanisme sudah ada sejak zaman dulu, dari zaman ke zaman kejadiannya hampir sama. Disinggung soal kerawanan di kafe, Hemas menilai konflik yang terjadi bukan karena kesalahan kafenya. Tetapi tergantung kepada kebijakan pemda dalam melakukan pengaturan terhadap kafe sebagai sarana hiburan dan wisata.

(Tri/Riz)-b

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kantor Kesatuan Bangsa			

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005